

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 6



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 10

# Hendi Desak DPU Selesaikan Pembebasan Lahan (Pemkot Batal Ambil Alih Normalisasi Kali Beringin)

**SEMARANG, TRIBUN** - Pemkot Semarang batal mengambil alih normalisasi Kali Beringin meski sebelumnya telah siap jika menganggarkan Rp 100 miliar. Berdasarkan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menyerahkan normalisasi kembali kepada BBWS.

Kabid Sumberdaya Air dan Drainase DPU Kota Semarang, Kumbino mengatakan normalisasi sebaiknya dilakukan pengampu kebijakan yakni BBWS Pemali Juana. Rencana pembangunan fisik akan dimulai 2018.

"Tugas kami tetap menyelesaikan pembebasan lahan 27

## STORY HIGHLIGHTS

- Pemkot Semarang membatalkan mengambil alih normalisasi Kali Beringin
- Wali Kota Hendrar Prihadi menyebut pembatalan itu berdasar saran BPK
- Hendrar Prihadi mendesak DPU untuk menyelesaikan pembebasan lahan

bidang tanah. Kendala selama ini yakni terkait administrasi karena satu bidang tanah ada yang dimiliki beberapa ahli waris sehingga kami harus menemukan bukti kepemilikan. Total anggaran untuk pembebasan

lahan Rp 7 miliar," ujarnya, Senin (13/2).

Kondisi Kali Beringin, kata Kumbino, perlu dinormalisasi karena sudah banyak sedimentasi. "Selain sedimentasi, hilir Kali Beringin menyempit sekitar empat meter. Sehingga kemarin ketika meluap ada sekitar tiga titik talut jebol yang membuat daerah Mangkang kebanjiran," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi membenarkan Pemkot batal ambil alih normalisasi Kali Beringin berdasarkan saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat

terkait normalisasi Kali Beringin. Namun akhirnya diputuskan normalisasi tetap dilakukan BBWS karena jika anggaran Pemkot dipakai pekerjaan yang wilayahnya BBWS nanti akan ada temuan BPK karena ada pos anggaran yang tidak efektif dan efisien," ujarnya.

Hendi mendorong BBWS segera melakukan normalisasi. "Paling lambat kata BBWS normalisasi pada 2018. Tugas Pemkot yakni pembebasan lahan dan saya sudah mendesak DPU untuk menyelesaikan pembebasan lahan," ujarnya.

Meski DAS Beringin menjadi kewenangan BBWS, Pemkot Semarang tetap bisa melakukan

aktivitas pengerukan sampah dengan menggunakan dana khusus. "Kami tetap bisa melakukan aktivitas yang diperlukan warga dan itu diperbolehkan," kata Hendi.

Selain itu, kepada masyarakat Kota Semarang menghadapi cuaca ekstrem ini, Hendi mengimbau agar merawat lingkungannya masing-masing. "Tugas merawat lingkungan harus bersama-sama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Buang sampah jangan di aliran sungai atau pohon-pohon untuk konservasi ditebangi untuk alih fungsi lahan. Jangan sampai banjir bandang di Ngaliyan terulang kembali," ujarnya. (gpe)

Bulan :